



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(L K I P)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, 30 Desember 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sumedang



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	2
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	4
1.5.1 Struktur Organisasi.....	4
1.5.2 Kondisi Sumber Daya Aparatur.....	4
1.5.3 Kondisi Sarana dan Prasarana	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.1.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah	8
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	8
2.1.3 Strategi.....	9
2.1.4 Arah Kebijakan	10
2.1.5 Program	11
2.2 Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja	14
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	36
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Perbaikan Kedepan	43
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, tata ruang dan jasa konstruksi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas PUPR, telaahan visi, misi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1.
Isu Strategis dalam Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Bina Marga	Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis : Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, rendahnya kualitas penyedia jasa konstruksi lokal, belum responsifnya penindakan pada kerusakan spontan.	Kualitas kondisi Jalan dan jembatan masih belum memadai
2	Permasalahan dalam Pengairan	Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis : Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, belum lengkapnya regulasi sebagai instrumen pendukung pelayanan, masih lemahnya pengembangan metode-metode teknis pelayanan dalam menyelesaikan masalah pengairan	Kualitas Jaringan Irigasi Belum Memadai
3	Permasalahan alam Tata Ruang	Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis : Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, belum lengkapnya regulasi sebagai instrumen pendukung pelayanan, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.	Belum optimalnya instrumen penataan dan pemanfaatan ruang Kabupaten Sumedang
4.	Permasalahan dalam jasa konstruksi	Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis : Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, pembinaan terhadap jasa konstruksi masih lemah, belum lengkapnya regulasi hukum dan instrumen SOP sebagai pendukung pelayanan.	Masih lemahnya kualitas penyedia jasa konstruksi Kabupaten Sumedang

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sumedang

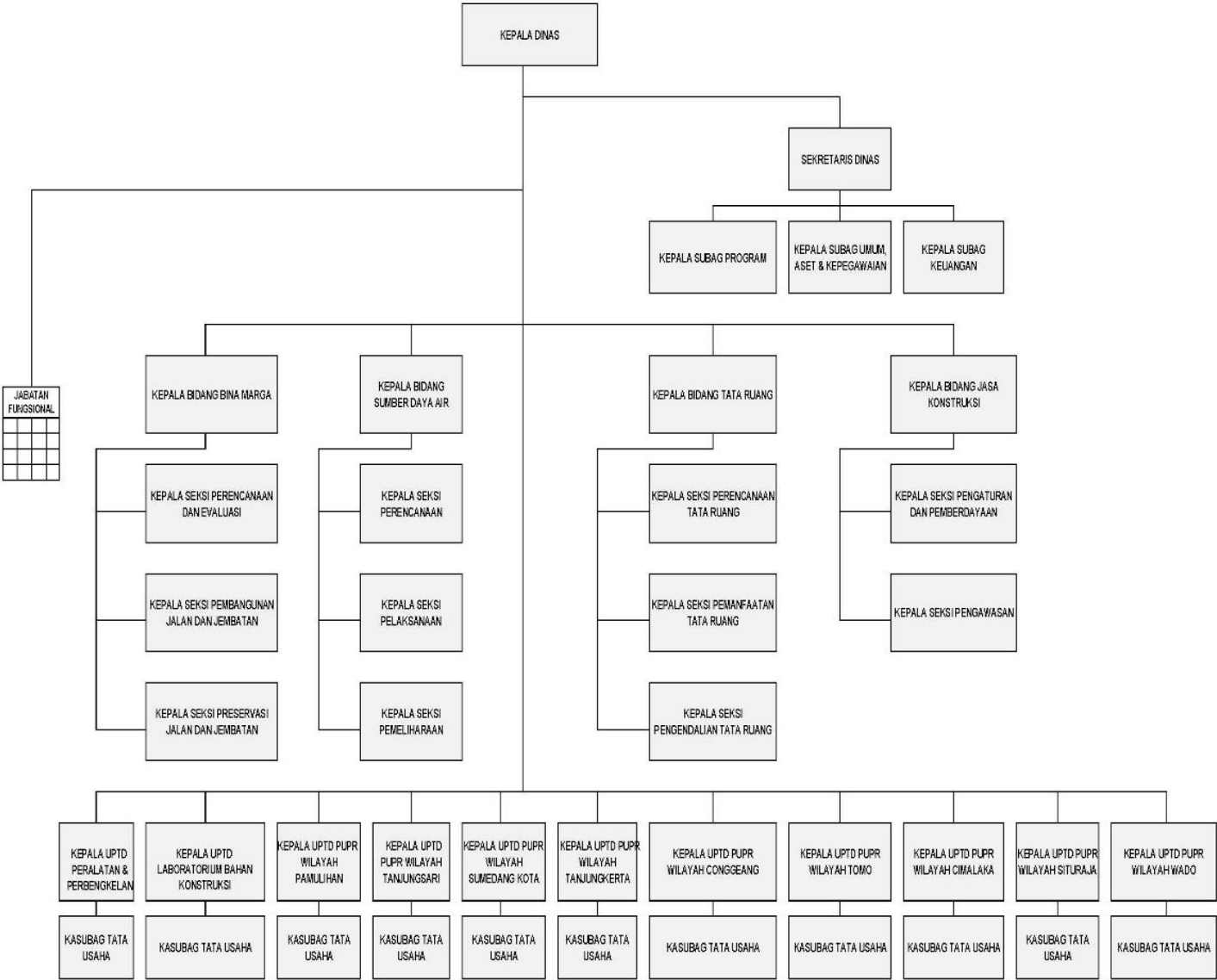
Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

1. Kualitas kondisi Jalan dan jembatan masih belum memadai;
2. Kualitas Jaringan Irigasi Belum Memadai;
3. Belum optimalnya sistem penataan ruang Kabupaten Sumedang;
4. Belum optimalnya sistem penataan ruang Kabupaten Sumedang.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

1.5.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dalam struktur organisasi sebagai berikut :



1.5.2 Kondisi Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 508 Orang, terdiri dari 186 orang Pegawai Negeri Sipil dan 322 orang Pegawai Honorer.

Adapun personil yang dimiliki lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten sumedang Per 30 Desember 2021

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Dinas	Pembina Tk. I - IV/b	S 2	1	
2.	Sekretaris	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
3.	Kepala Bidang (Kabid)			4	
	- Kabid. Bina Marga	Penata Tk.I - III/d	S1	1	
	- Kabid. Sumber Daya Air	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Kabid. Tata Ruang	Pembina - IV/a	S 2	1	
	- Kabid. Jasa Konstruksi	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
4.	Kepala UPTD			11	
	- PUPR Wilayah Pamulihan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Tanjungsari	Penata – III/c	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Sumedang Kota	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Tanjungkerta	Penata – III/c	S 2	1	
	- PUPR Wilayah Conggeang	Penata – III/c	S 2	1	
	- PUPR Wilayah Tomo	Penata – III/d	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Cimalaka	Penata – III/c	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Situraja	Penata – III/c	S 2	1	
	- PUPR Wilayah Wado	Pembina – IV/a	S 1	1	
	- Peralatan dan Perbengkelan	Penata – III/c	S1	1	
	- Laboratorium Bahan Kontruksi	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
5.	Kepala Seksi (Kasi)			11	
	Bid. Bina Marga			3	
	- Kasi. Perencanaan dan Evaluasi	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
	- Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Preservasi Jalan dan Jembatan	Penata – III/c	S2	1	
	Bid. Sumber Daya Air			3	
	- Kasi. Perencanaan	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
	- Kasi. Pelaksanaan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Kasi. Pemeliharaan	Penata – III/c	S 2	1	
	Bid. Tata Ruang			3	
	- Kasi. Perencanaan Tata Ruang	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Kasi. Pemanfaatan Tata Ruang	Penata – III/c	S 2	1	
	- Kasi. Pengendalian Tata Ruang	Pembina - IV/a	S 2	1	
	Bid. Jasa Konstruksi			2	
	- Kasi. Pengaturan dan Pemberdayaan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Kasi. Pengawasan	Penata – III/c	S 1	1	
6.	Kepala Sub Bagian (Kasubag)			14	
	Sekretariat			3	
	- Kasubag Program	Penata – III/c	S 1	1	
	- Kasubag Umum, Aset dan Kepegawaian	Penata – III/c	S 1	1	
	- Kasubag Keuangan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	Tata Usaha UPTD			11	
	- PUPR Wilayah Pamulihan	Penata – III/c	S1	1	
	- PUPR Wilayah Tanjungsari	Penata – III/c	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Sumedang Kota	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Tanjungkerta	Penata Muda Tk.I – III/b	S1	1	
	- PUPR Wilayah Conggeang	Penata – III/c	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Tomo	Penata – III/c	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Cimalaka	Penata – III/c	S 2	1	
	- PUPR Wilayah Situraja	Penata – III/c	S 1	1	
	- PUPR Wilayah Wado	Penata – III/c	S 1	1	
	- Peralatan dan Perbengkelan	Penata – III/c	S 2	1	
	- Laboratorium Bahan Konstruksi	Penata – III/c	S 2	1	
7.	Staf/Pelaksana				
	- PNS			151	
	- Pengelola Program dan Kegiatan	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	- Penglola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penata – III/c	S 1	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML	KET.
1	2	3	4	5	6
		Penata Muda – III/b	S 1	1	
	- Pengadministrasi Persuratan	Pengatur Tk.I – II/d	SLTA	1	
	- Pelaksana Sub Bagian Umum Aset dan Kepegawaian	Penata Muda – III/a	SLTA	1	
		Pengatur TK.I II/d	SLTA	2	
		Pengatur – II/c	SLTA	1	
	- Pramu Bhakti	Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTP	1	
	- Bendahara	Penata – III/c	S2	1	
		Penata Muda Tk. I – III/b	S1	1	
	- Pengelola Gaji	Penata Muda Tk. I – III/b	D3	1	
	- Pengadministrasi Penerimaan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
	- Pengadministrasi Keuangan	Penata Muda Tk. I – III/b	SLTA	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	4	
		Pengatur – II/c	SLTA	1	
	- Pengolah Data Aplikasi	Pengatur – II/c	D3	1	
	- Pengelola Keuangan	Penata TK.I– III/d	S1	1	
		Penata-III/c	S1	2	
	- Penilik Jalan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	4	
	- Pengawas Jalan dan Jembatan	Penata Muda Tk. I – III/a	S1	2	
	- Analis Jalan Jembatan	Penata Muda TK. I – III/a	S1	1	
	- Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Penata Muda TK.I – III/b	D3	1	
	- Pemeriksa Jalan dan Jembatan	Penata Muda – III/a	S1	1	
	- Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a	S1	2	
		Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	17	
		Pengatur – II/c	SLTA	6	
		Pengatur Muda TK.I – II/b	SLTA	1	
	- Pengawas Irigasi	Penata – III/a	S 1	4	
	- Analis Sumber Daya Air	Penata – III/c	S1	1	
	-	Penata Muda TK.1 – III/b	S1	1	
	-	Penata Muda – III/a	S1	1	
	- Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	Penata Muda – III/b	SLTA	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	2	
	- Pengelola Jaringan Irigasi	Pengatur – II/c	D3	1	
	- Pengelola Sumber Daya Air	Pengatur – II/c	D3	1	
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pengatur – II/c	D3	2	
	- Petugas Operasi dan Pemeliharaan	Pengatur TK.1 – II/d	SLTA	13	
		Pengatur – II/c	SLTA	8	
		Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTA	1	
	- Analis Tata Ruang	Penata – III/c	S2	1	
	- Analis Pemanfaatan Ruang	Penata Muda Tk. I – III/b	S2	1	
	-		S1	1	
	- Pengawas Tata Ruang	Penata – III/c	S1	1	
	- Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penata Muda – III/a	S1	2	
	-	Pengatur Muda – II/c	D3	2	
	- Pengadministrasi Umum Tata Ruang	Penata Muda – III/a	S1	1	
	- Penelaah Mutu Konstruksi	Penata – III/c	S1	1	
	-	Penata Muda – III/a	S1	1	
	- Pengelola Jasa Konstruksi	Penata Muda – III/a	D3	3	
	- Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	Penata Muda TK.I – III/b	S1	1	
	- Pengelola Pemeliharaan Laboratorium	Penata Muda TK.I – III/b	D3	1	
	- Pemelihara peralatan laboratoriun	Pengatur TK.I – II/d	SLTA	1	
	- Pengawas Pengoperasian Alat Berat	Penata Muda – III/a	S1	1	
	- Operator Alat Berat	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	13	
		Pengatur – II/c	SLTA	4	
		Pengatur Muda TK. I – II/b	SLTA	1	
	- Pramu Kebersihan	Pengatur – II/c	SLTP	1	
		Pengatur Muda TK.I – II/b	SLTP	1	
		Pengatur Muda – II/a	SLTP	2	
			SD	1	
		Juru TK.I – I/d	SD	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML	KET.
1	2	3	4	5	6
	JF Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S1	5	
	JF Teknik Pengairan Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S1	2	
	JF Penata Ruang Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S1	1	
	- Honorer			322	
			S 2	19	
			S 1	62	
			D3	14	
			SLTA	84	
			SLTP	5	
			SD	2	
	Jumlah PNS			186	
	Jumlah Honorer			322	
	Jumlah Total			508	

Sumber : DUK Per 30 Desember Tahun 2021 Dinas PUPR Kab. Sumedang

1.5.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten sumedang Per 30 Desember 2021

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Kondisi			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Buldozer	1	1			
2	Wheel Excavator + Attachment	4	1	3		
3	Excavator lainnya (dst)	1		1		
4	Dump Truck	3		2	1	
5	Vibration Roller	2	2			
6	Stamper	8		6	2	
7	Vibration Plate	2	2			
8	Compacting equipment lainnya (dst)	24	2	22		
9	Truck Crane	1		1		
10	Alat pengangkat lainnya (dst)	1	1			
11	Portable Generating Set	1	1			
12	Portable Water Pump	15	4	1	10	
13	Jeep	1		1		
14	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9	7	2		
15	Truck + Attachment	1		1		
16	Pick Up	7	3	4		
17	Yeengler/Trailer	1		1		
18	Sepeda Motor	50	23	26	1	
19	Mobil Tangki Air	1		1		
20	Panhard	2			2	
21	Gerobak Dorong	28	28			
22	Mesin Gerinda	1			1	
23	Mesin Kompresor	2			2	
24	Mesin Bor Tangan	1	1			
25	Winder	1		1		
26	Mesin Gergaji	16	16			
27	Mesin Bor Kayu	1			1	

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Kondisi			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
28	Peralatan Las Listrik	1			1	
29	Peralatan Las Karbit	1			1	
30	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	1			1	
31	Water Pas	9		9		
32	Meteran Kain	72	72			
33	Rol Meter	98	80	16	2	
34	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	62	62			
35	Global Positioning System	45	31	12	2	
36	Alat Ukur Sigmat	5	5			
37	Picnometer	8		8		
38	Bejana Ukur	1		1		
39	Alat Penakar Hujan	1	1			
40	Pacul	141	141			
41	Garpu Pacul	96	96			
42	Garu	45	45			
43	Alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	140	140			
44	Arit	135	135			
45	Pacul Dangir	90	90			
46	Alat Pengambil Sample Tanah	3	3			
47	Alat Laboratorium lainnya	4		4		
48	Container	3		3		
49	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	4		3	1	
50	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	3		3		
51	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	7		3	4	
52	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	20		20		
53	Mesin Stensil Listrik Folio	1			1	
54	Mesin Fotocopy Folio	2	2			
55	Lemari Kayu	70	1	69		
56	Rak Kayu	8	6	2		
57	Filing Cabinet Besi	85	34	51		
58	Lemari Kaca	2	1	1		
59	CCTV - Camera Control Television System	1	1			
60	Papan Visual/Papan Nama	1	1			
61	White Board	1		1		
62	Alat Penghancur Kertas	8	8			
63	Mesin Absensi	35	35			
64	Overhead Projector	9	5	4		
65	Papan Nama Instansi	27	26	1		
66	Papan Pengumuman	3	3			
67	Alat Kantor Lainnya	5	5			
68	Meja Kerja Besi/Metal	15	1	14		
69	Meja Kerja Kayu	10			10	
70	Kursi Kayu	68		3	65	
71	Sice	12		10	2	
72	Meja Rapat	5	2	3		
73	Meja Ketik	1	1			
74	Meja Telepon	7			7	
75	Meja Resepsionis	2	2			
76	Meja Panjang	1			1	
77	Meja 1/2 Biro	407	105	265	37	
77	Kursi Rapat	70		70		
78	Kursi Tamu	12	4	8		
79	Kursi Putar	50	33	16	1	
80	Kursi Biasa	18		3	15	
81	Kursi Lipat	799	333	409	57	
82	Meja Komputer	11	3	1	7	
83	Meubeleur lainnya	22	1	20	1	
84	Jam Elektronik	1	1			
85	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1			

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Kondisi			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
86	Mesin Pemotong Rumput	46	29	17		
87	Lemari Es	2	2			
88	A.C. Window	20	18	2		
89	A.C. Split	4	4			
90	Kipas Angin	17	16	1		
91	Exhaust Fan	5	5			
92	Kompas Gas (Alat Dapur)	7		7		
93	Rice Cooker (Alat Dapur)	41		41		
94	Rice Warmer	1		1		
95	Televisi	8	8			
96	Amplifier	1	1			
97	Loudspeaker	7	7			
98	Sound System	2	2			
99	Camera Video	59	32	27		
100	Dispenser	3	3			
101	Tangga Hidrolik	1	1			
102	Handy Cam	9	3	6		
103	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	3	1		
104	Alat Pemadam/Portable	2			2	
105	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	19	15	4		
106	Telephone Hybrid	1			1	
107	Microphone/Wireless MIC	1	1			
108	peralatan studio audio lainnya (dst)	7	7			
109	Video Tape Recorder Portable	1	1			
110	Slide Projector	3	3			
111	Layar Film/Projector	3	3			
112	Camera Conference	2	2			
113	Waterpas	3	3			
114	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	2			
115	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	9	6	3		
116	Pesawat Telephone	12		12		
117	Telephone Mobile	7	7			
118	Handy Talky (HT)	23	23			
119	Facsimile	2	2			
120	Alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	2	2			
121	Wireless Amplifier	2		2		
122	Electric Compression Tester	2		2		
123	Drill Machine	6	6			
124	Saw Machine For Concrete	1	1			
125	Alat Pemeriksa Agregat	6	6			
126	Organic Impurity Test Set	1		1		
127	Slump Test Set	4	1	3		
128	Concrete Hammer Set	4	2	2		
129	Beaker Toll From Graduates	3		3		
130	Alat laboratorium aspal, cat dan kimia lainnya (dst)	139		139		
131	Modified Mold	13		13		
132	Heavy Duty Solution Balance	1		1		
133	Drilling	2	2			
134	Lightweight Concrete Test Hammer	1	1			
135	Penetrasi Asphalt (Universal Penetrometer)	1	1			
136	Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	168		168		
137	Drying Oven	1		1		
138	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	1		1		
139	Timbangan/Neraca	7		7		
140	Alat Destilasi Air	1		1		
141	Crucible Penyaring	8		8		
142	Alat laboratorium mikrobiologi lainnya (dst)	1		1		
143	Mesin Drawing	1			1	

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Kondisi			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
144	Ketel Pemasakan	1		1		
145	Current Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	1			
146	Diamond Saw	1	1			
147	Tachometer (General Laboratory Tool)	2			2	
148	Beaker	1		1		
149	Optical Clinometer	2	2			
150	peralatan hidrologi lainnya (dst)	1		1		
151	Golok	80	80			
152	Komputer Jaringan lainnya	1		1		
153	P.C Unit	118	86	16	16	
154	Lap Top	130	118	12		
155	Note Book	6	4		2	
156	Hard Disk	1		1		
157	Keyboard (Peralatan Mainframe)	8		8		
158	peralatan mainframe lainnya (dst)	1			1	
159	Speaker Komputer	8	1	7		
160	Peralatan Minikomputer lainnya	69	4	65		
161	CPU (Peralatan Personal Komputer)	5		5		
162	Monitor	8	3	5		
163	Printer (Peralatan Personal Komputer)	175	156	5	14	
164	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	5	1		
165	Peralatan Personal Komputer lainnya	6	6			
166	Server	1	1			
167	Router	2	2			
168	Modem	2	2			
169	Peralatan Jaringan lainnya	4	4			
170	Sepatu Boot	108	108			
171	Sepatu lapangan lainnya (dst)	69	69			
172	Rambu tidak bersuar lainnya (dst)	1	1			

Sumber : Aplikasi SIPASTI BMD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang adalah Misi ke-3 yaitu Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal (kalimat misi dimaksud). Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Mewujudkan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang mantap	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten mantap	Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten mantap
	Mewujudkan sistem pengairan yang optimal	Rasio jaringan irigasi	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk irigasi	Rasio jaringan irigasi
	Mewujudkan Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang
	Mewujudkan Pelayanan Jasa Konstruksi yang baik	Persentase tersedianya usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi	Meningkatnya ketersediaan informasi penyedia jasa konstruksi	Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi

Sumber : Renstra Dinas PUPR Kab. Sumedang

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jembatan;
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian;
4. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
5. Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang;
6. Penyelesaian penyusunan seluruh rencana tata ruang yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional;
7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyedia jasa konstruksi.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan;	Penambahan jaringan jalan;
		Peningkatan kualitas jaringan jalan;
		Pemeliharaan jaringan jalan;
2	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jembatan;	Penambahan jembatan;
3	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian;	Fasilitasi kebutuhan pertanian, perikanan, dan peternakan;
		Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
		Pembangunan dan pemeliharaan pintu air;
4	Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian banjir;	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai longsor;
5	Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang;	Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk informasi tata ruang;
6	Penyelesaian penyusunan seluruh rencana tata ruang yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional;	Penetapan seluruh rencana detail tata ruang kota dan peraturan zonasi secara bertahap;

Sumber : Renstra Dinas PUPR Kab. Sumedang

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Sumber : Renstra Dinas PUPR Kab. Sumedang

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	74,80	
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	66	
Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100	
Meningkatnya Ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi	Persen	60	
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas internal perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A	
	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	98	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Buah	3	
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	Persen	75	

Sumber : Renstra Dinas PUPR Kab. Sumedang

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2021	Target Akhir Renstra 2023
1	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,80	74,80	82,80
2	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	60,00	66	70
3	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100	100	100
4	Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi	Persen	0	60	100
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	-	A	AA
6	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	-	98	99.36
7	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Buah	-	3	5
8	Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	Persen	-	75	85

Sumber : Renstra Dinas PUPR Kab. Sumedang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	74,80
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	66
Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100
Meningkatnya Ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi	Persen	60

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

3.1.Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1) PERSENTASE TINGKAT KONDISI JALAN KABUPATEN MANTAP

Menurut Permen PU No.13 tahun 2011 Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Untuk mengetahui proporsi kondisi jalan kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten dan sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan. Faktor yang mempengaruhi kemantapan jalan adalah tingkat kerusakan permukaan jalan itu sendiri dimana hal tersebut sangat penting untuk

kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Untuk mengetahui jenis kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat dilakukan survei dan analisis dengan metode Surface Distress Index (SDI). Besaran nilai indeks SDI ditentukan oleh kondisi permukaan jalan yang terjadi kerusakan seperti retak, lubang, dan rutting.

Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan dikalikan 100%.

Panjang Jalan Kabupaten dalam
Kondisi Baik dan Sedang
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten

X 100

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap” tahun 2021 sebesar 74,80% dan realisasinya sebesar 83,21% atau capaian kinerja sebesar 111,24% (kinerja Sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021

NO	Kondisi Jalan	Realisasi Tahun 2021		
		KM	%	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap
1	Kondisi Baik	392,495	50,69	83,21%
2	Kondisi Sedang	251,878	32,53	
3	Kondisi Rusak Ringan	70,019	9,04	
4	Kondisi Rusak Berat	59,976	7,75	
	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten	774,368	100	

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	74,80	83,21	111,24%	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 83,21%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 76,96%. Terjadi Kenaikan kinerja sebesar 2,54%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

saran Strategis	Indikator Kinerja	Satua n	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisa si Kinerja	Persent ase Realisas i Kinerja	Target Kinerja	Realsias i Kinerja	Persenta se Realisas i Kinerja	
Meningkatny a Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Perse n	70.8	76.96	108,70	74.80	83,21	111,24	Meningkat

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra DPUPR 2018-2023**

Dalam Renstra DPUPR 2018-2023, target jangka menengah Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap adalah 82,80% dan realisasi pada tahun 2021 adalah 83,21%, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap pada tahun Ketiga Renstra DPUPR adalah 100,498%.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021 Dengan Target Renstra DPUPR

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	82,80%	83,21%	100,498%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional**

===*Tidak Ada data*===

e. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap di Kabupaten Sumedang adalah:

1. Dengan adanya penanganan rekonstruksi jalan Pada Tahun 2021 sepanjang 17,438 KM , rehabilitasi jalan sepanjang 3,637 KM, pemeliharaan rutin dan berkala sepanjang 26,174 KM dapat menambah kondisi jalan baik dan sedang menjadi 644,373 KM.
2. Meningkatnya nilai kegiatan pemeliharaan rutin;
3. Adanya kegiatan Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL);
4. Kualitas database jalan dan jembatan semakin baik;
5. Survey database dilakukan oleh konsultan (Pihak Ke 3);
6. Adanya dukungan anggaran survey database pada alokasi perubahan;
7. Adaya kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Data Jalan Daerah (SIPDJD) yang dilaksanakan oleh Kemeterian PUPR setiap awal tahun.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap di Kabupaten Sumedang tahun 2021 sebesar Rp. 61.977.630.000,00 yang terdiri dari 2 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 55.893.624.697,00 atau 90,184 %.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Jalan	58.163.480.000,00	52.113.574.747,00	89,60
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.814.150.000,00	3.780.049.950,00	99,11
Jumlah Total	61.977.630.000,00	55.893.624.697,00	90,184

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap tahun 2021 adalah sebagai berikut .:

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	111,24%	90,18%	21,056	Efisien

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap, yaitu :

1) Program Penanganan Jalan dan Jembatan

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan tahun 2021 yaitu Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik dan Sedang dengan target sebesar 77,30% dan realisasinya 83,21% atau capaian kinerja sebesar 111,24 %. Target kinerja melebihi target dikarenakan :

1. Dengan adanya penanganan rekonstruksi jalan Pada Tahun 2021 sepanjang 17,438 KM , rehabilitasi jalan sepanjang 3,637 KM, pemeliharaan rutin dan berkala sepanjang 26,174 KM dapat menambah kondisi jalan baik dan sedang (Mantap) menjadi 644,373 KM dan tercapai Capaian Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten mantap sebesar 83,21%
2. Meningkatnya nilai kegiatan pemeliharaan rutin;
3. Adanya kegiatan Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL);
4. Kualitas database jalan dan jembatan semakin baik;
5. Survey database dilakukan oleh konsultan (Pihak Ke 3);
6. Adanya dukungan anggaran survey database pada alokasi perubahan;
7. Adanya kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Data Jalan Daerah (SIPDJD) yang dilaksanakan oleh Kemeterian PUPR setiap awal tahun.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator kinerja Program **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** tahun 2021 yaitu Persentase Sistem Drainase Yang baik di wilayah perkotaan dengan target sebesar 45% dan realisasinya terealisasi 33,17%, tidak mencapai target disebabkan oleh Berkurangnya alokasi Anggaran pelaksanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase tahun 2021, sehingga Panjang penanganan drainase berkurang.

2) RASIO JARINGAN IRIGASI

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan luas daerah irigasi dalam kondisi terhadap lahan budidaya pertanian. Luas budidaya pertanian di Kabupaten Sumedang sebesar 30069 ha terdapat 1543 daerah irigasi. Semakin meningkatnya nilai Rasio Jaringan Irigasi maka semakin luas daerah irigasi yang terairi.

Nilai Rasio Jaringan Irigasi merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun serta pengelolaan jaringan irigasi secara efektif dan merata pada setiap lahan pertanian baik di hulu maupun di hilir.

Nilai rasio jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi Yang Terairi}}{\text{Luas Lahan Budidaya Pertanian}} \times 100$$

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Rasio Jaringan Irigasi” tahun 2021 sebesar 66% dan realisasinya sebesar 67,02% atau capaian kinerja sebesar 101,55% (kinerja tinggi). Target kinerja tercapai.

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021

No	Variabel	Tahun 2021	
		Uraian	Satuan
1	Luar Daerah Irigasi yang Terairi	20.151,61	Ha
2	Luas Lahan Budi Daya Pertanian	30.069	Ha
3	Rasio Jaringan Irigasi	67,02	%

Tabel 3.10
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Rasio Jaringan Irigasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	66	67,02	101,55	Sangat Tinggi

Sumber : Renstra Dinas PUPR Kab. Sumedang

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 67,02%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 64,46%. Terjadi Kenaikan kinerja sebesar 0,82%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	64	64.46	100,72	66	67,02	101,54	Meningkat

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra DPUTR 2018-2023

Dalam Renstra DPUTR 2018-2023, target jangka menengah Rasio Jaringan Irigasi adalah 70% dan realisasi pada tahun 2021 adalah 66,70%, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Rasio Jaringan Irigasi pada tahun Ketiga Renstra DPUTR 2018-2023 adalah 95,28%.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021
Dengan Target Renstra DPUTR 2018-2023

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021
Rasio Jaringan Irigasi	70%	67,02%	95,72%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

- d. *Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional*
===Tidak Ada data=====
- e. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan*

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target Rasio Jaringan Irigasi adalah:

1. Adanya penanganan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan Luas Area yang terairi seluas 384,185 Ha Peningkatan Jaringan irigasi dengan luas penanganan seluas 230,511 Ha dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan luas area penanganan seluas 153,674 Ha sehingga total penanganan dari ketiga Sub kegiatan tersebut seluas 768,37 Ha dapat menambah Luas Area Irigasi dalam kondisi baik menjadi 20151,61 Ha
2. Penanganan daerah Irigasi di Kabupaten Sumedang sesuai dengan Kewenangan yang telah ditetapkan.
3. Dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi/perbaikan kondisi bangunan air dan saluran guna mengembalikan fungsi layanan jaringan irigasi.
4. Pelaksanakan pemberian air sudah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Air dan apabila ada kekurangan dalam pembagian air maka pelaksanaan pembagian giliran air sudah biasa dilaksanakan dengan efektif dan efisien..

- f. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumedang tahun 2021 sebesar Rp. 23.794.003.000,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 22.379.450.125,00 atau 94,20 %.

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	23.794.003.000,00	22.379.450.125,00	94,20
Jumlah Total	23.794.003.000,00	22.379.450.125,00	94,20

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Rasio Jaringan Irigasi tahun 2021 adalah sebagai berikut :.

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	101,54%	94,20%	7,34%	Efisien

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Rasio Jaringan Irigasi, yaitu :

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Indikator kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) tahun 2021 yaitu Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan target sebesar 45,20% dan realisasinya 45,20% atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja tercapai karena Adanya penanganan Sub Kegiatan meliputi Rehabilitasi Jaringan, Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan jarigan irigasi adanya penanganan sepanjang 28.758,62 m’ dapat menambah panjang irigasi dalam kondisi baik menjadi 955.327,95 m’ (45,20%) dan menghasilkan Luas Area Irigasi yang terairi menjadi 20151,61 Ha dan tercapai target Kinerja Rasio Jaringan Irigasi sebesar 67,02%

3) PERSENTASE KESESUAIAN PERUNTUKAN LAHAN DENGAN TATA RUANG

Pengertian atau definisi dari Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan Dengan Tata Ruang adalah upaya untuk merencanakan peruntukkan penggunaan lahan ataupun pemanfaatan lahan yang sesuai dengan fungsi dan kewasannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah suatu daerah.

Data Rencana Peruntukkan menggunakan data luasan yang bersumber dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 yang telah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018. Berdasarkan RTRW tersebut, luasan Kabupaten Sumedang adalah sebesar 155.872 Ha yang tersebar dalam 26 Kecamatan.

Data Realisasi RTRW menggunakan Jumlah izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Tata Ruang menggunakan data variable data statis dan data dinamis. Data variable data statis dan data dinamis yang digunakan dalam perhitungan rumus ini adalah :

1. Luas kawasan lindung (data statis) di Kabupaten Sumedang seluas 49.587 Ha. Kawasan lindung ini berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 terdiri dari Hutan Lindung, Resapan Air, Sempadan Sungai, Sempadan Waduk,

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja
Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang	Persen	100	75.11	75.11	100	75.33	75.33	Meningkat

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra DPUTR 2018-2023**

Dalam Renstra DPUTR 2018-2023, target jangka menengah Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang adalah 100% dan realisasi pada tahun 2021 adalah 75,30%, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang pada tahun Ketiga Renstra DPUTR 2018-2023 adalah 75,33%.

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan
dengan Tata Ruang 2021 Dengan Renstra DPUTR 2018-2023

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021
Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang	100%	75,33%	75,33%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional**

===Tidak Ada data===

e. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang adalah karena adanya

1. Perubahan Peraturan Daerah RTRW yang lama (Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012) ke Peraturan Daerah yang baru (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018) yang merubah klasifikasi pola ruang
2. Perubahan Regulasi terkait Penataan Ruang dimulai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3. Pemberlakuan Perizinan Berusaha dan investasi dengan system *one single Submission* membutuhkan penyesuaian dalam SOP pelayanan terkait penerbitan Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)

Adapun Alternatif Solusi yang dilakukan untuk mengatasi ketidaktercapaian target Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penetapan RDTR untuk pusat pusat kegiatan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
2. Peningkatan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan ruang
3. Perumusan kembali formulasi target iku terkait dinamika perubahan dalam penataan ruang
4. Kolaborasi dalam penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang dengan kementerian terkait dan dunia akademik.
5. Penguatan system basis data penyusun rencana tata ruang
6. Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang tahun 2021 sebesar Rp. 1.096.100.000,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 895.908.650,00 atau 81,74 %.

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.196.100.000,00	1.135.463.900,00	94,93
Jumlah Total	1.196.100.000,00	1.135.463.900,00	94,93

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang tahun 2021 adalah sebagai berikut .:

Tabel 3.20
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang	75,33%	94,93%	-19,60%	Tidak Efisien

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang, yaitu :

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang tahun 2021 yaitu :

- 1. Persentase ketersediaan RTR dengan target sebesar 50 % dan realisasinya 50% atau capaian kinerja sebesar 100 % hal ini ditandai dengan tersusunnya 2 dokumen RDTR (materi Teknis) dan 2 dokumen RRTR, selain itu juga dengan terpenuhinya 10 objek pemanfaatan ruang;
- 2. Persentase pelayanan pemanfaatan ruang target sebesar 80 % dan realisasinya 80 % atau capaian kinerja sebesar 100%

Dengan terbitnya lebih dari 37 berkas informasi ruang (1215,195 Ha) berkontribusi terhadap pencapaian IKU Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang sebesar 75,33%

4) PERSENTASE TERSEDIANYA USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERSTANDARISASI

Indikator Persentase Tersedianya Usaha Jasa Konstruksi Yang Terstandarisasi Adalah capaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang Jasa Konstruksi dengan tujuan Mewujudkan Pelayanan Jasa Konstruksi yang baik dengan sasaran strategis meningkatnya ketersediaan informasi Penyedia Jasa Konstruksi.

Nilai Persentase Tersedianya Usaha Jasa Konstruksi Yang Terstandarisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$\frac{\text{Jumlah Penyedia Jasa Yang Memenuhi Kualifikasi Teknis}}{\text{Total Jumlah Penyedia Jasa di Kabupaten Sumedang}} \times 100$$

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi” tahun 2021 sebesar 60% dan realisasinya sebesar 66% atau capaian kinerja sebesar 100% (kinerja tinggi). Target kinerja tercapai.

Tabel 3.21
Realisasi Kinerja
Tersedianya Usaha Jasa Konstruksi Yang Terstandarisasi Tahun 2021

No	Variabel	Tahun 2021	
		Uraian	Satuan
1	Jumlah Penyedia Jasa Yang Memenuhi Kualifikasi Teknis	265	Penyedia Jasa
2	Total Jumlah Penyedia Jasa di Kabupaten Sumedang	432	Penyedia Jasa
3	Persentase Tersedianya Usaha Jasa Konstruksi Yang Terstandarisasi	60,34	%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

Tabel 3.22
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Rasio Jaringan Irigasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi	Persen	60	60,34	100,57	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

b. *Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya*

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 66%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 40,06%. Terjadi Kenaikan kinerja sebesar 19,94%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja
Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi i Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi i Kinerja	Persentase Realisas i Kinerja	
Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi	Persen	40	40.06	100,15	60	60,34	100,57	Meningkat

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra*

Dalam Renstra 2018-2023, target jangka menengah Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi adalah 100% dan realisasi pada tahun 2021 adalah 60%, dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Rasio Jaringan Irigasi pada tahun Ketiga Renstra adalah 60%.

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase tersedianya usaha Jasa
Kontruksi yang terstandarisasi Tahun 2021
Dengan Target Renstra DPUTR 2018-2023

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021
Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi	100%	60%	60,34%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

d. *Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional*

===Tidak Ada data=====

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi adalah:

1. Terjalannya komunikasi dan koordinasi antara Bidang Jasa Konstruksi selaku Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang dengan Asosiasi dan anggota Asosiasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang;
2. Adanya dukungan dari Asosiasi dan anggota Asosiasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang dalam mendukung penyelenggaraan Program/Kegiatan Bidang Jasa Knstruksi.;
3. Berjalannya proses sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan dalam penyelenggaraan Tenaga Terampil Konstruksi;
4. Adanya penambahan jumlah usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di Kabupaten Sumedang;
5. Lebih aktifnya penyedia Jasa untuk mengupdate data perusahaannya di Aplikasi SIMJAKON sehingga informasi ketersediaan data bertambah;
6. Bidang Jasa Konstruksi lebih pro aktif mensosialisasikan pentingnya mengupdate data penyedia di Aplikasi SIMJAKON.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi tahun 2021 sebesar Rp. 277.200.000,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 264.855.000,00 atau 95,55 %.

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	327.200.000,00	327.000.000,00	99,94
Jumlah Total	327.200.000,00	327.000.000,00	99,94

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Rasio Jaringan Irigasi tahun 2021 adalah sebagai berikut .:

Tabel 3.26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi	100,57%	99,94%	0,63%	Efisien

Sumber : Dinas PUPR Kab. Sumedang

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi, yaitu :

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Indikator kinerja **Program Pengembangan Jasa Konstruksi** tahun 2021 yaitu Jumlah usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang dengan target sebesar 260 Penyedia Jasa dan realisasinya 265 Penyedia Jasa atau capaian kinerja sebesar 100 %. Target kinerja Mencapai target dikarenakan :

1. Dengan adanya penambahan jumlah usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi teknis pada tahun 2021 sebanyak 92 Penyedia Jasa dari 173 penyedia jasa Tahun 2020 yaitu menjadi 265 Penyedia Jasa, maka melebihi dari target Jumlah usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di wilayah Kabupaten Sumedang tahun 2021 sebanyak 260 penyedia jasa;
2. Tercapaiannya Jumlah Penyedia Jasa yang memenuhi kualifikasi teknis menjadi 265 Penyedia berkontribusi terhadap pencapaian target Indikator Sasaran yaitu 60,34 %
3. Terjalannya komunikasi dan koordinasi antara Bidang Jasa Konstruksi selaku Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang dengan Asosiasi dan anggota Asosiasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang;
4. Adanya dukungan dari Asosiasi dan anggota Asosiasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang dalam mendukung penyelenggaraan Program/Kegiatan Bidang Jasa Knstruksi.;
5. Berjalannya proses sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan dalam penyelenggaraan Tenaga Terampil Konstruksi;
6. Adanya penambahan jumlah usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi teknis di Kabupaten Sumedang;
7. Lebih aktifnya penyedia Jasa untuk mengupdate data perusahaannya di Aplikasi SIMJAKON sehingga informasi ketersediaan data bertambah;

8. Bidang Jasa Konstruksi lebih pro aktif mensosialisasikan pentingnya mengupdate data penyedia di Aplikasi SIMJAKON.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 91,75 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	58.163.480.000,00	52.113.574.747,00	89,60	6.049.905.253,00
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	58.163.480.000,00	52.113.574.747,00	89,60	6.049.905.253,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	833.672.500,00	827.625.600,00	99,27	6.046.900,00
		Rekonstruksi Jalan	26.737.600.500,00	24.339.686.932,00	91,03	2.397.913.568,00
		Rehabilitasi Jalan	4.895.100.000,00	4.379.390.750,00	89,46	515.709.250,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan	23.334.588.500,00	20.336.926.115,00	87,15	2.997.662.385,00
		Pemeliharaan Rutin Jalan	2.160.000.000,00	2.029.001.850,00	93,94	130.998.150,00
		Pembangunan Jembatan	2.518.500,00	2.518.500,00	100,00	-
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.814.150.000,00	3.780.049.950,00	99,11	34.100.050,00
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.814.150.000,00	3.780.049.950,00	99,11	34.100.050,00
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3.814.150.000,00	3.780.049.950,00	99,11	34.100.050,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	29.600.148.000,00	28.067.656.125,00	94,82	1.501.978.875,00
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	35.948.000,00	71,90	14.052.000,00
		Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	50.000.000,00	35.948.000,00	71,90	14.052.000,00
		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.550.148.000,00	28.031.708.125,00	94,86	1.487.926.875,00
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	438.200.000,00	383.080.000,00	87,42	55.120.000,00
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.854.800.000,00	4.790.657.000,00	98,68	64.143.000,00
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	23.757.148.000,00	22.379.450.125,00	94,20	1.347.184.875,00
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	500.000.000,00	478.521.000,00	95,70	21.479.000,00
Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	327.200.000,00	327.000.000,00	99,94	200.000,00
		Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	149.600.000,00	149.400.000,00	99,87	200.000,00
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	149.600.000,00	149.400.000,00	99,87	200.000,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	-
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	-
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.196.100.000,00	1.135.463.900,00	94,93	60.636.100,00
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	996.100.000,00	940.893.900,00	94,46	55.206.100,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	996.100.000,00	940.893.900,00	94,46	55.206.100,00
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	96.626.000,00	96,63	3.374.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	996.100.000,00	940.893.900,00	94,46	55.206.100,00
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	97.944.000,00	97,94	2.056.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100.000.000,00	90.524.000,00	90,52	9.476.000,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	97.944.000,00	97,94	2.056.000,00
Total			93.101.078.000,00	85.423.744.722,00	91,75	7.677.333.278,00

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2020) realisasi anggaran sebesar 83,88%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 28
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2020)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Program Penanganan Jalan dan Jembatan	85.209.170.952,00	68.605.832.400,00	80,51	16.603.338.552,00
		Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten	7.397.845.480,00	6.847.547.839,00	92,56	550.297.641,00
		Rehabilitasi Jembatan	1.075.000.000,00	978.388.600,00	91,01	96.611.400,00
		Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten	2.869.200.000,00	2.767.671.761,00	96,46	101.528.239,00
		Penanganan Saluran Drainase dan Trotoar, TPT dan Gorong-gorong Ruas Jalan Kabupaten	3.391.313.000,00	3.357.983.750,00	99,02	33.329.250,00
		Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	1.231.450.000,00	1.225.399.250,00	99,51	6.050.750,00
		Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten (Banprov)	19.458.361.420,00	13.571.523.250,00	69,75	5.886.838.170,00
		Pembangunan Saluran Drainase, TPT dan Gorong-gorong Ruas Jalan Kabupaten Sumedang	10.200.000.000,00	9.564.552.000,00	93,77	635.448.000,00
		Pembangunan Jembatan	4.723.908.000,00	4.493.000,00	0,10	4.719.415.000,00
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten	15.488.379.052,00	13.876.820.100,00	89,60	1.611.558.952,00
		Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL)	2.210.150.000,00	2.182.522.400,00	98,75	27.627.600,00
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten (DAK Fisik)	13.275.575.000,00	10.867.837.000,00	81,86	2.407.738.000,00
		Pemeliharaan Jalan (Banprov)	3.887.989.000,00	3.361.095.450,00	86,45	526.893.550,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan	32.268.716.500,00	29.490.646.800,00	91,39	2.778.069.700,00
		Perencanaan Teknis Irigasi Kabupaten	91.750.000,00	87.885.200,00	95,79	3.864.800,00
		Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten	103.500.000,00	102.863.200,00	99,38	636.800,00
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten	13.424.682.500,00	13.143.331.800,00	97,90	281.350.700,00
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten (Banprov)	11.682.000.000,00	9.941.734.300,00	85,10	1.740.265.700,00
		Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten (Banprov)	3.000.000.000,00	2.953.524.100,00	98,45	46.475.900,00
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten (DAK Fisik)	3.481.784.000,00	2.793.217.500,00	80,22	688.566.500,00
		Pemuktahiran Data Base Irigasi di Kabupaten Sumedang	110.000.000,00	105.700.650,00	96,09	4.299.350,00
		Pemeliharaan Jaringan Irigasi (tersebar)	375.000.000,00	362.389.950,00	96,64	12.610.050,00
		Program Pengendalian Banjir	50.000.000,00	48.812.900,00	97,63	1.187.100,00
Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang	Pengadaan Bahan banjiran	50.000.000,00	48.812.900,00	97,63	1.187.100,00
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	374.300.000,00	373.410.000,00	99,76	890.000,00
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	96.300.000,00	96.300.000,00	100,00	0,00
		Bimbingan Teknis dan Sertifikat Tenaga Teknis Terampil Jasa Konstruksi	200.000.000,00	199.120.000,00	99,56	880.000,00
Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi	Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Jasa Kontruksi	78.000.000,00	77.990.000,00	99,99	10.000,00
		Program Penataan Ruang	2.929.550.000,00	2.834.697.467,00	96,76	94.852.533,00
		Pembuatan Peta Dasar	948.400.000,00	927.928.705,00	97,84	20.471.295,00
		Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang	297.000.000,00	283.301.792,00	95,39	13.698.208,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Pelayanan Informasi Tata Ruang	50.000.000,00	48.261.850,00	96,52	1.738.150,00
		Penyusunan KLHS RDTR Kecamatan	659.400.000,00	629.817.300,00	95,51	29.582.700,00
		Revisi Dokumen Teknis RDTR 4 (empat) Kecamatan	366.700.000,00	353.259.480,00	96,33	13.440.520,00
		Validasi KLHS RDTR Ujungjaya	120.000.000,00	118.702.500,00	98,92	1.297.500,00
		Penyusunan RDTR KSK dan Pusat Kegiatan	438.050.000,00	424.701.540,00	96,95	13.348.460,00
		Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	50.000.000,00	48.724.200,00	97,45	1.275.800,00
		JUMLAH	120.831.737.452,00	101.353.399.567,00	83,88	19.478.337.895,00

Dengan demikian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 7,87%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sebagai berikut :

- A. SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten Untuk Untuk Indikator Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap tercapai sebesar 111.24% maka skala nilai kinerja " SANGAT TINGGI".
- B. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi untuk Indikator Rasio Jaringan Irigasi tercapai sebesar 101,55% maka skala nilai kinerja " SANGAT TINGGI".
- C. SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah untuk indicator Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang tercapai sebesar 75,33% maka skala nilai kinerja "TINGGI".
- D. SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk indicator Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi tercapai sebesar 100,57% maka skala nilai kinerja "SANGAT TINGGI".

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Dilakukan Sosialisasi tentang SAKIP
- 2) Dilakukan Kesepakatan Kinerja Melalui Dialog Kinerja dan Berita Acara
- 3) Penggunaan Sistem Pelaporan Kinerja Secara Aplikasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, 30 Desember 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sumedang



Ir. DENI RIFDRIANA, MM
Pegawai TK I – IV/h